

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang didirikan pada 17 Agustus 1945 adalah sebuah negara kesatuan berbentuk republik. Pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi, dan setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota. Setiap kabupaten atau kota kemudian dibagi lagi menjadi unit pemerintahan terkecil yang disebut desa.¹

Identitas terserap dari kata Bahasa Inggris “*identity*”, yang berarti memiliki tanda ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut di mana memudahkan untuk berkomunikasi dan mencerna simbol-simbol yang mengerti berdasarkan pola pikir maupun opini komunitas yang sesuai dengan pemahamannya.²

Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*)

¹ Hari Febriansyah, “Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Pancamukti Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin Tahun 2019).” (Palembang, UIN Raden Fatah, 2021), hlm 1.

² Wening Purbatin Palupi Soenjoto, “Eksplorasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Milenial Indonesia di Era 4.0” Vol 4 (2019.), hlm 189.

sebagai suatu kategori politik yang utama. Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing.

Politik identitas sering digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan menyebut diri mereka sebagai "orang asli" yang menginginkan kekuasaan, sementara "orang pendatang" diharuskan melepaskan kekuasaan. Singkatnya, politik identitas dimanfaatkan sebagai alat untuk manipulasi atau untuk menggalang dukungan politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politik mereka.¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa politik identitas menurut peneliti adalah suatu tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan identitas baik dalam hal etnis, jender, budaya, dan agama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya. Politik identitas sering digunakan untuk merekrut dukungan orang-orang yang termarginalkan dari kelompok mayoritas.²

Ada perbedaan antara identitas politik (*political identity*) dengan politik identitas (*political of identity*). Identitas politik merupakan suatu konstruksi yang dapat menentukan kepentingan di dalam suatu komunitas politik. Sedangkan politik identitas mengacu kepada mekanisme politik baik

¹ Haboddin Muhtar, "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal" Vol 3 (2012), hlm 120.

² Suyatno Kahar, "Politik Identitas Dalam Pilgub Maluku Utara 2018 (Studi kasus pada Pilgub Maluku Utara 2018 dalam Perspektif Sosiologi Komunikasi dan Politik)." Vol 11 (2020), hlm 62.

terhadap identitas politik maupun identitas sosial sebagai sarana politik dalam mewujudkan kepentingan politik.³

Sejarah munculnya politik identitas bisa dilihat dari rentang waktu, ilmuwan sosial baru tertarik kepada isu politik identitas pada 1970-an, bermula di Amerika Serikat, ketika menghadapi masalah minoritas, jender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan, merasa teraniaya. Dalam perkembangan selanjutnya cakupan politik identitas ini meluas kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam.⁴

Arnold Steinberg menganggap strategi sebagai rencana atau tindakan. Strategi adalah rencana yang dibuat oleh para pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu; penyusunan dan pelaksanaannya menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi tersebut.

Strategi politik adalah metode yang dirancang dan dipahami sebelumnya untuk mewujudkan cita-cita politik dalam jangka panjang. Perencanaan strategi politik melibatkan analisis yang jelas tentang situasi kekuasaan, gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai, serta keputusan mengenai penggunaan segala sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.

³ Muhtar, Haboddin “*Mengatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*” Vol 3 (2012) hlm 14.

⁴ Suyatno Kahar, “*Politik Identitas Dalam Pilgub Maluku Utara 2018 (Studi kasus pada Pilgub Maluku Utara 2018 dalam Perspektif Sosiologi Komunikasi dan Politik)*.”Vol 11 (2020), hlm 68.

Strategi politik bertujuan untuk merealisasikan semua rencana yang telah disusun, dengan fokus utama pada pemilihan, yaitu mendapatkan suara terbanyak sebagai tanda kemenangan untuk meraih kekuasaan. Kekuasaan ini menjadi sasaran utama dari sebuah strategi karena kemenangan politik ini dapat digunakan dalam sistem politik.⁵

Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan, soal personal dan social, apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain.⁶ Ketika kita membicarakan identitas di situ juga kita membicarakan kelompok.

Kelompok sosial adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain dan terlibat dalam satu kegiatan bersama atau sejumlah orang yang mengadakan hubungan tatap muka secara berkala karena mempunyai tujuan dan sikap bersama, hubungan-hubungan yang di atur oleh norma-norma, tindakan-tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan kedudukan status dan peranan (*role*) masing-masing dan antara orang-orang itu terdapat rasa ketergantungan satu sama lain.⁷

Teori identitas sosial menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk mengkategorikan diri ke dalam kelompok

⁵ Febriansyah, *Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Desa...*, hlm 3.

⁶ Chris Barker, *Cultural Studies : Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : PT. Kreasi Wacana,2008) hlm 221.

⁷ Jabal Tarik Ibrahim, "*Sosiologi Pedesaan*" (Magelang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2003) hlm 64.

dan "membedakan kelompok mereka sendiri secara positif dari orang lain untuk mencapai identitas sosial yang positif".⁸

Mengenai keberagaman atau heterogenitas ini, sejatinya Al-Qur'an sudah memberikan gambaran terkait hal yang demikian. Dalam QS. Al-Hujurat: 13, Allah Swt Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."⁹

Dikaitkan dengan demokrasi. Demokrasi menurut Joseph Alois Schumpeter merupakan kehendak rakyat dan kebaikan bersama. Mayo berpendapat bahwa demokrasi adalah ketika kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan, sementara Huntington mengidentikkan demokrasi dengan pemilu.

⁸ Anthony Nadler, "Political identity and the therapeutic work of US Conservative media. *International Journal of Communication*," (2022) hlm 16.

⁹ Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahnya, CV Darus Sunnah (Jakarta Timur, 2012), QS Al-Hujurat Ayat 13.

Pemilu menurut Huntington¹⁰ merupakan alat serta tujuan demokrasi, kebanyakan orang kemudian mengidentikkan demokrasi dengan pemilu meskipun menurut sebagian kalangan, musyawarah mufakat masih dianggap sebagai bentuk budaya demokrasi asli masyarakat Indonesia yang tumbuh sejak lama, Seperti halnya disampaikan Haynes demokrasi di kebanyakan negara dunia ketiga lebih memperlihatkan sisi formalitas, yang terpusat pada prosedur dan tata kelembagaan, dan lebih khusus lagi terfokus pada pemilihan umum.

Survei lembaga indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kabupaten seruyan pada tahun 2022¹¹ di Indonesia sekitar (1.660,72) percaya demokrasi adalah sistem terbaik untuk Indonesia, dan mampu menyelesaikan masalah lebih lanjut Marcus Mietzner mencatat bahwa demokratisasi di Indonesia lebih menampilkan wajah popularitas figur di hadapan rakyat¹². Pemaknaan demokrasi jauh dari persoalan kinerja politik, namun mengarah pada performa individu.

Penerapan yang dilakukan identitas seseorang dapat dilihat dari cerminan berpolitiknya. Perkembangan politik identitas tidak luput dari permasalahan yang ada di belahan dunia saat ini, ungkapan politik identitas

¹⁰ Haynes, Jeffrey. "Democracy in the Developing World: A Comparative Perspective on the Role of Elections." dalam *International Political Science Review* 21, no. 1 (2000): hlm 41-62.

¹¹ <https://seruyankab.bps.go.id/indicator/12/68/1/jumlah-penduduk.html> di akses 12 Maret 2024 Pukul 23:44 WITA.

¹² Andy Prima Shalatua, "Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022)", (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2018) hlm 1-2.

sebagai politik yang gagal artinya kepentingan politik hanya didepankan pada para elite tertentu.¹³

Setelah menjelaskan tentang politik identitas dan teori lainnya di atas maka selanjutnya penjelasan tentang pemerintahan, salah satunya adalah desa. Desa atau sebutan lainnya seperti nagari, marga, kampung, dusun, dati dan sebagainya merupakan sebuah komunitas adat dan sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa Sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Desa merupakan suatu sistem sosial dengan lembaga sendiri di mana desa memiliki lembaga politik, ekonomi, peradilan, dan sosial budaya yang dikembangkan oleh masyarakatnya sendiri. Misalnya dalam lembaga politik, desa mempunyai kepala desa dan Perangkat desa yang tata cara dan pengaturan tugas pokok dan fungsinya dikembangkan sendiri berdasarkan inisiatif masyarakat desa sendiri, bukan berdasarkan instruksi dari pemerintah di atasnya.

¹³Graceylla, Robyn "Pengaruh Politik Identitas Terhadap Kemenangan Pemilihan Kepala Daerah di Kabuapten Sintang" (Doctoral Dissertation, IPDN 2023) hlm 2.

Pemilihan kepala desa adalah hak untuk mengelola dan mengatur politik lokal di pedesaan serta proses untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kerangka pelaksanaan otonomi desa. Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Undang-Undang tentang Desa telah membawa suasana baru dalam proses pemilihan kepala desa, dan tidak dapat disangkal bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan ini telah meningkatkan antusiasme mereka dalam memperkuat kehidupan demokrasi.

Pemilihan kepala desa juga merupakan pesta rakyat, di mana momen ini menjadi kesempatan untuk menampilkan individu-individu yang mampu melindungi kepentingan masyarakat desa. Penduduk desa memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih siapa yang akan memimpin desa mereka.

Pemilihan kepala desa secara langsung adalah mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin di desa, di mana seluruh rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk memilih kandidat yang mereka dukung. Oleh karena itu, para kandidat harus berusaha mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dengan menggunakan strategi politik dalam kampanye mereka, yang mencakup penyampaian visi dan misi yang akan dilaksanakan jika terpilih.¹⁴

¹⁴ Hari Febriansyah, "*Politik Identitas*" ..., hlm 2-4.

Kepala daerah juga memiliki tugas dan fungsi yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014. Akan tetapi, saat masa jabatan kepala daerah sudah selesai dan menunggu waktu pemilihan kepala daerah secara serentak, maka akan terjadi kekosongan jabatan yang menyebabkan adanya pengangkatan pejabat pelaksanantugas (PLT). Kepala daerah namun masa jabatan plt ini terbatas dan tidak boleh terlalu lama atau sampai pada pilkada berikutnya karena plt kepala daerah hanya memiliki masa jabatan 6 bulan dan maksimal 1 tahun. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas mengenai aturan pembatasan masa jabatan pelaksanaan tugas (PLT).

Pelaksana tugas atau (PLT) merupakan pejabat sementara yang mengisi posisi jabatan kepala desa yang memiliki dasar hukum berdasarkan Pasal 47A (1) Peraturan Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa¹⁵. Pemilihan kepala desaa antar waktu melalui musyawarah desa, Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati/wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala desa antar waktu hasil musyawarah Desa.

¹⁵ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa., 2017.*

Pada dasarnya kekosongan jabatan kepala daerah dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena kepala daerah meninggal dunia, habis masa jabatan atau diberhentikan karena melanggar norma hukum. Dari penyebab tersebut, maka salah satu penyebab kepala daerah dapat diberhentikan apabila Kepala daerah melanggar norma-norma hukum yang menyebabkan dirinya terlibat dalam tindak pidana.¹⁶

Selain ia sebagai pelaksana tugas di desa ternyata dari hasil penelitian terungkap bahwa PLT itu mempunyai keinginan yang sangat kuat bukan hanya sebagai PLT dia juga ingin mencalonkan sebagai PLT Kepala Desa Sandul dengan menggunakan politik identitas dengan menggandeng tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa tersebut, selain itu plt ini juga melakukan strategi-strategi pemenangan di dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Sandul.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka perlu dilakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Strategi Pemenangan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Sandul Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Tahun 2022)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertuang di atas, maka dapat di tarik suatu permasalahan yang nantinya menjadi objek dalam pembahasan yang di rumuskan sebagai berikut:

¹⁶ Enrico Gustian Isvardo, *“Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”* (2022), hlm 5.

1. Bagaimana Politik Identitas yang di gunakan oleh PLT Kepala Desa dalam pemenangan Menjadi PLT Kepala Desa Sandul Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Pada Tahun 2022?
2. Apa strategi yang digunakan oleh PLT Kepala Desa dalam pemenangan pemilihan PLT Kepala Desa di Desa Sandul?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini, Antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana politik identitas yang di gunakan dalam oleh PLT Kepala Desa dalam pemenangan Sandul Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui apa strategi yang digunakan PLT Kepala Desa tersebut dalam pemenangnya menjadi PLT Kepala Desa Sandul.

D. Signifikasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan ilmiah serta menjadi sumber informasi baru bagi masyarakat dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai penggunaan politik identitas sebagai strategi untuk menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa di Desa Sandul, Kecamatan Baatu Ampar, Kabupaten Seruyan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan peneliti itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana politik identitas digunakan sebagai strategi untuk menjadi Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa di Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman, kekeliruan dan untuk memperjelas judul penelitian, berikut peneliti memberikan definisi judul penelitian:

1. Strategi Pemenangan

Strategi pemenangan adalah sebuah cara yang telah dipahami dan disusun terlebih dahulu untuk merealisasikan cita-cita politik yang digunakan untuk perubahan jangka panjang.¹⁷ Strategi pemenangan dalam hal ini sangat diperlukan demi tercapainya apa yang menjadi kepentingan elit tersebut pada pemenangan PLT Kepala Desa Sandul.

2. Politik Identitas

Secara teoritis politik adalah politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras,

¹⁷ Betsiana, Mei RN. *"Strategi Pemenangan Incumbent Pada Pilkada 2017 di Kabupaten Brebes."* S1 Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang. PPs Universitas Negeri Semarang (2017). hlm 11.

etnisitas, jender, atau keagamaan.¹⁸ Politik identitas yang dimaksud adalah politik yang digunakan dalam pemenangan PLT kepala desa.

3. Pelaksana Tugas (PLT)

Pelaksana tugas atau (PLT) merupakan pejabat sementara yang mengisi posisi jabatan kepala daerah yang memiliki dasar hukum berdasarkan Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.¹⁹ Pelaksana tugas yang dimaksud adalah seseorang yang mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Sandul dikarenakan habisnya masa jabatan kepala desa sebelumnya.

4. Desa

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).²⁰ Desa yang dimaksud dalam hal ini adalah desa yang mana lokasi tempat terjadinya fenomena yang akan diteliti.

5. Pemilihan Kepala Desa

¹⁸ Nasarudin Juhana, "*Politik identitas dan representasi politik (Studi kasus pada Pilkada DKI periode 2018-2022).*" (2018), hlm 36.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), 2015.

²⁰ "Arti Kata Desa – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, " diakses 23 juni 2024, <https://kbbi.web.id/desa> Pukul 17: 32 WITA.

Pemilihan kepala desa, atau yang lebih dikenal dengan "pilkades," adalah sebuah sistem yang diterapkan sebagai bentuk aturan demokrasi dalam pemerintahan. Melalui pilkades, masyarakat secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam mensukseskan dan menjadi bagian penting dari demokrasi terpimpin.²¹ Dalam hal ini pada pemilihan PLT kepala desa dilaksanakan dengan musyawarah mufakat dengan badan pengurus desa.

6. Kajian Pustaka

Dalam melakukan kajian penelitian ini, peneliti menganalisis penelitian sebelumnya yang membahas mengenai (Politik Identitas Sebagai Pemenangan Kepala Desa). Topik ini telah banyak dibahas oleh peneliti terdahulu dan memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hari Febriansyah berjudul "*Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Pancamukti, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019)*."²²

Penelitian ini merupakan studi hukum empiris yang berfokus pada politik identitas, dengan menekankan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin pemerintahan bergantung pada pengaruh seseorang

²¹ Susanti Ayu Sari, "*Konflik Pemilihan Kepala Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang 2014)."

²² Febriansyah, "*Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Pancamukti Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019)*."

desa dan tokoh masyarakat dalam menggalang suara. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pemerintah atau politik desa membuat strategi pemenangan melalui politik identitas menjadi sangat efektif. Penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang, yaitu tentang politik identitas dalam pemilihan kepala desa. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa dan dilakukan di lokasi yang berbeda.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Andy Prima Sahalutua berjudul “*Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah studi kasus pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017-2022*”.²³

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, yang berfokus pada kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 sebagai bukti bahwa identitas dapat menjadi basis kekuatan yang penting. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan lokasinya, di mana penelitian ini lebih cenderung membahas bagaimana terpilihnya PLT kepala desa. Namun, kesamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Suyatno Kahar yang berjudul “*Politik Identitas Dalam Pilgub Maluku Utara 2018 (Studi Kasus*

²³ Shalutua, “*Politik Identitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022)* (Doctoral dissertation, Universitas sultan ageng tirtayasa).”

Pada Pilgub Maluku Utara 2018 dalam Prespektif Sosiologi Komunikasi dan Politik”.²⁴

Penelitian ini mengadopsi metode studi kasus yang mengeksplorasi penyelenggaraan pemilihan umum dan dinamika partai politik di Maluku Utara. Meskipun penelitiannya berbeda dalam objek dan lokasi, kesamaannya terletak pada penggunaan jenis studi kasus sebagai metode penelitian.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Enrico Gustian Isvardo yang berjudul “*Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*”²⁵.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau sumber sekunder sebagai dasar untuk penelitian, dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang terkait dengan masalah yang diselidiki. Fokus penelitian ini adalah pada kewenangan pelaksanaan tugas (PLT) bupati/walikota dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menyoroti permasalahan yang masih ada, seperti keberadaan PLT yang tidak sesuai dengan lingkungan kerjanya. Meskipun berbeda

²⁴ Suyatno Kahar, “*Politik Identitas Dalam Pilgub Maluku Utara 2018 (Studi kasus pada Pilgub Maluku Utara 2018 dalam Perspektif Sosiologi Komunikasi dan Politik)*.”

²⁵ Isvardo, “*Kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. SI thesis, Ilmu Hukum.*”

dalam pendekatan yuridis normatif, penelitian ini tetap fokus pada isu yang sama, yaitu PLT, seperti penelitian sebelumnya.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Robyn, Gracellya yang berjudul “*Pengaruh Politik Identitas Terhadap Kemenangan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sintang*”.²⁶

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang akan digunakan terdiri dari data sekunder dan primer. Fokus penelitian adalah pada politik identitas yang memengaruhi kemenangan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sintang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan metode kualitatif, sementara persamaannya adalah keduanya memusatkan perhatian pada politik identitas yang memengaruhi kemenangan PLT Kepala Desa Sandul.

7. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika yang sistematis, terdiri dari lima bab. Setiap bab membahas permasalahan yang berbeda, namun tetap terhubung secara keseluruhan. Setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara umum, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berfungsi sebagai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika

²⁶ Robyn, “*Pengaruh Politik Identitas Terhadap Kemenangan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sintang (Doctoral dissertation, IPDN)*.”

penulisan. Bagian latar belakang menjelaskan mengapa penelitian politik identitas dalam pemenangan PLT kepala desa (Studi Kasus di Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan Tahun 2022) dilakukan, serta alasan-alasan yang mendasarinya.

Bab II membahas landasan teori, yang mencakup teori-teori yang memberikan penjelasan tentang deskripsi umum atau topik yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, bab ini akan membahas landasan teori terkait dengan masalah politik identitas, mencakup aspek-aspek seperti politik identitas itu sendiri, strategi politik, partisipasi politik, budaya politik, pemilihan kepala desa, pelaksanaan tugas (PLT), dan desa.

Bab III merupakan bagian yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Bagian ini mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan prosedur penelitian yang ditetapkan.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis mengenai Strategi Pemenangan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa di Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan pada Tahun 2022. Pada bab ini, peneliti menjelaskan secara rinci hasil penelitian yang diperoleh setelah melakukan observasi lapangan.

Bab V merupakan bagian penutup, di mana disajikan simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I. Simpulan ini bukan sekadar ringkasan dari uraian sebelumnya, melainkan hasil dari pemecahan permasalahan yang diidentifikasi dalam skripsi. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang didasarkan pada temuan penelitian.